YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI TUGAS PENGHULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

M. Zakhwan Haris
147310268

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI TUGAS PENGHULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Oleh : M. Zakhwan Haris

Pemerintah Kepenghuluan diberikan kewenangan didalam penyelenggaraan pembangunan di Kepenghuluan berdasarkan atas kepentingan masyarakat Kepenghuluan. Pelaksanaan Tugas Penghulu Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan Kepenghuluan meliputi pembangunan Bahu Jalan, pembangunan Box Curver dan pembangunan Semenisasi. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir serta mengetahui hambatan pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian didalam Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilirm elalui tiga indikator berada pada katagori cukup baik. Namun penulis menyarankan kepada penghulu agar melaksanakan tugasnya dengan baik didalam kegiatan dan penetapan pembangunan, serta terjalinnya kerjasama dengan perangkat kepenghuluan didalam pembangunan Kepenghuluan, dan Melakukan kerjasama dengan Masyarakat Kepenghuluan agar kegaiatan pembangunan tepat sasaran dan berguna bagi kemajuan Kepenghuluan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF THE TASK OF VILLAGE IN THE IMPLEMENTATION IN THE LONG RANTAU VILLAGE, KUBU BABUSSALAM DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT

ABSTRAK

By : M. Zakhwan Haris

The Village Government is given authority in the implementation of development in Village based on the interests of the Village community. The implementation of the tasks of the Head of Rantau Panjang Left of Kubu Babussalam Subdistrict, Rokan Hilir Regency in the physical development of the Village includes the construction of the Shoulder Shoulder, the construction of a Box Curver and the construction of a Semenisasi. The purpose of this study was to determine the implementation of the Head of Duties in the Implementation of Physical Development in the Rantau Panjang District of Kubu Babussalam Rokan Hilir District and to know the obstacles in carrying out the Head of Duties in Organizing Physical Development in the Management of Rantau Panjang in the Left of Kubu Babussalam District, Rokan Hilir District. This research is a study quantitative. The results of the study in the Task of the Headmaster in Organizing Physical Development in Rantau Panjang Village of Kubu Babussalam Subdistrict, Rokan Hilirm Regency through three indicators are in the category of Good Enough. But the authors suggest to the Village to carry out their duties properly in the activities and determination of Physical development, as well as establishing cooperation with the Village apparatus in the physical development of the Village, and Cooperating with Communities in order that physical development activities are targeted and useful for the progress of the Village.

Keywords: Evaluation, Policy, Development.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam menyeleggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah. Sebagaimana didapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia diabagi atas daerah-daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu Negara kesatuan Republik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 menyebutkan dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul da n adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan Desa penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, yaitu pasal 18 Bab IV dimana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.

   Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dimaksudkan yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemerintahan Desa yang memang telah ada sejak Desa tersebut dibentuk, seperti pelaksanaan peraturan-peraturan Desa yang menyangkut tradisi adat istiadat Desa setempat.

2. Urusanpemerintah yang berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

   Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan tetap terkoordinasi melalui pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota.

3. Tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

   Yaitu tugas-tugas yang bersifat pemantauan baik perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, dengan demikian Desa adalah penyelenggara pemerintahan terendah didalam susunan kepemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, pemerintah Desa diberi kewenangan sangat besar salah satunya yaitu pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya, pemerintah bersama perangkat Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 mengatakan "kepala Desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dimaksud dalam konteks pengembangan masyarakat dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa dimana dijelaskan pada Peraturan Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pada pasal 15 dikatakan “

1. Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
2. Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melaui musyawarah dusun dan / atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Peraturan Mentri Dalam Negri (Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. tokoh adat
   b. tokoh agama
   c. tokoh masyarakat
   d. tokoh pendidikan
   e. perwakilan kelompok tani
   f. perwakilan kelompok nelayan
   g. perwakilan kelompok perajin\
   h. perwakilan kelompok perempuan
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak dan
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maka dari itu semua unsur masyarakat bisa ikut serta dalam memusyawarahkan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Itu pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan didesa serta pembanguunan oleh pemerintah dengan membuat kebijaksanaan yang mendorongnya untuk berkembangnya keikut sertaan masyarakat desa.

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Kecamatan yang sedang berkembang dengan luas wilaya 371,94 Km^2, terdiri dari 12 Kepenghuluan/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 22.888 Jiwa, sedangkan dari kepenghuluan tersebut adalah Kepenghuluan Rantau Panjang dengan jumlah penduduk sebanyak 3.110 jiwa.

Penghuluan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dimana dikatakan tugas pokok dan fungsi aparatur kepenghuluan rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babu Salam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 bahwa tugas pokok penghulu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan dan
3. Menyelenggarakan Urusan Kemasyaralatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud penghulu mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
2. Mengajukan rencana peraturan Kepenghuluan (Perkep)
3. Menetapkan Peraturan kepenghuluan yang telah mendapat persetujuan bersama BPK.
4. Menyusun dan mengajukan rencangan peraturan kepenghulu mengenai APBKep untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK.
5. Membina kehidupan masyarakat Kepenghulu.
6. Membina perejonomian kepenghulu.
7. Mengkoordinasikan pembangunan kepenghuluan secara partisipatif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Mewakili kepenghulu didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk wakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas penghulu diatas bahwa penghulu menyelenggarakan urusan pembangunan secara partisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan tsecara partisipatif dengan tujuan pemerataan pembangunan yang berdasarkan pengembangan kemajuan Kepenghuluan.

Salah satu dari kepenghuluan itu adalah Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri mempunyai luas wilayah 1.666,5 Ha dengan Jumlah penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri sebanyak 3.110 jiwa, dan adapun batas-batas wilaya Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri adalah:

a. Sebelah UTARA: Kepenghuluan sungai Kubu, sungai Kubu hulu (Sungai) Kecamatan Kubu dan PT. Jatim jaya perkasa kecamatan Kubu Babussalam.
b. Sebelah TIMUR:Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, sungai majo pusako dan jojol Kecamatan Kubu Babussalam.
c. Sebelah SELATAN:Kepenghuluan tanjung leban (sungai) kecamatan kubu dan kepenghuluan teluk nilap kecamatan kubu babussalam.
d. Sebelah BARAT: Kepenghuluan sungai segajah (sungai) kecamatan kubu dan kepenghuluan sungai majo kecamatan kubu babussalam.

Rencana pembangunan tidak terlepas dari ketetapan kegiatan pembangunan Kepenghuluan yang tidak terlepas dari Musyawarah pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepenghuluan. Sesuai dari hasil dari berita acara musyawarah Kepenghuluan yaitu pembahasan RPJMKep 2016 – 2021 yang disepekati secara bersama yang diikut sertakan unsur masyarakat, Lembaga Permasyarakat Desa dan Pemerintah kepenghuluan. Adapun pokok – pokok hasil musyawarah yang telah disepakati sebagai berikut:

A. Menyepakati RPJMKep dengan rincian sebagai berikut :

B. Bidang pembangunan

a. Pembangunan Ruang Publik
b. Drainase Jalan Jalur – Jalur Penghuluan Yang Dirasa Perlu
c. Seminisasi
d. Pembangunan Pagar TK
e. Pembangunan Bahu Jalan
f. Pengadaan Alat Permainan TK
g. Pemasangan Pafing Blok Halaman Kantor Penghuluan Rantau Pangjang Kiri
h. Pembangunan Drainase Jaln Poros Penghuluan
i. Pembangunan Rukan Babinkantibmas
j. Pembangunan Box Couver
k. Servis Dan Perbaikan Gorong – Gorong Jalan Lingkungan
l. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
m. Pembangunan Rumah Bidang Penghuluan
n. Pembangunan Kantor Penghuluan Baru
o. Pemasangan Pafing Blok Depan TK

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

p. Pembangunan Gedung MDA

q. Pembangunan Kantor Kepala Dusun

Berdasarkan penjelasan diatas kepentingan masyarakat dalam pembangunan Kepenghuluan setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kepenghuluan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kepenghuluan, maka Kepenghuluan diharuskan mempunyai rencana pembangunan tahunan Kepenghuluan (RKPKep) untuk dapat mendukung suatu pembangunan melalui anggaran yang ada di RKPKep harus sesuai dengan APBKep (Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan) untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran,dalam pembangunan yang disusun oleh pemerintahan pusat atau aparatur desa yang membahas tentang besarnya alokasi anggaran yang bersangkutan serta program dan kegiataan yang akan dilakukan. Dengan cara, pengalokasian anggaran pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiataan yang telah direncanakan sesuai dengan APBKep.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Kepenghuluan sagatlah dibutuhkan keikut sertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Kepenghuluan tersebut. Adapun berikut kegiatan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kec.Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1 Pembangunan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Angaran tahun 2018

No	Jenis Kegitan	Biaya	Volume	Sumber Dana
1	Pembangunan Bahu Jalan Sidodadi.	127,550,900.00	150 m x 2.10 = 315	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
	Pembangunan Bahu Jalan Jalan Sidodadi.	127,550,900.00	130 m x 2.00 = 260	
2	Pembangunan Box Curver Kep. Rantau Panjang Kiri.	12,052,000.00	40x40x100cm	
3	Renovasi Tugu (Batas Wilayah) Kep. Rantau P.Kiri	9.019.000		
4	Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung Masjid	65.792.200	104 M x 2.10 M x 0.15M = 3.276	
	Semenisasi Gang Yasih	71,841,904.00	106 M x 2.10 M x 0.15M = 3.339	
	Semenisasi Jalan Datuk Penghulu.	199,673,600.00	173 M x 4 M x 0.15 M = 1.038.	
	Semenisasi Jalan Sakya.	116,328,200.00	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	

Sumber: Kantor Kepala Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, 2020

Dari tabel diatas Program Pembangunan yang telah Dilaksanakan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri 2018. Pembangun yang dilaksanakan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri. Hal ini penghulu lebih memberikan pemeraaan pembangunan di tegah masyarakat sehingga diketahui masih banyak pembangunan yang belum terealisasi dan tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepala Kepenghuluan belum dapat melaksanakan pembangunan Kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara luas yang diberikan penghuluan terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penjelasan diatas adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas kepala Kepenghuluan dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat Sebagai Berikut:

1. Diketahui efektivitas penghulu dalam kegiatan pembagunan belum terlaksana dengan maksimal dimana kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan belum tepat sasaran terhadap kebutuhan pembangunan Desa.
2. Kegiatan penetapan pembangunan Kepenghuluan terlihat belum memberikan keluasan terhadap aspirasi masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat melainkan cenderung penetapan berdasarkan usulan Penghulu.
3. Kegiatan Musyawarah Pembangunan Kepenghuluan belum dihadiri secara menyeluruh oleh unsur masyarakat dan Lembaga Permasyarakatan Kepenghuluan sehingga penetapan pembangunan belum tepat sasaran.

Dari Fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Analisa dengan judul penelitian yaitu **"Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **"Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir".**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
b. Untuk mengetahui factor penghambat dalam Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam bagi Masyarakat dalam Partisipasi Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Musanef (dalam Syafie 2003 ;32) mendefenisikan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Suatu Ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan ubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarak yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi kordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan- pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005 ;321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga Negara)

Selanjutnya Syafie (2005 ; 36), mendefanisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang di perintah.

Syafhendri (2008 ; 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangn maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meberi perlindungan kepada masyarakat.

Ndraha (2008;174) berpendapat bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masin-masing. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Aparatur pemerintahan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diambil sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada dirinya sendiri, oranglai (masyaraka) dan kepada Tuhannya(Allah) dengan sebaik-baiknya guna mensejahterakan masyarakat banyak, sebagai mana sesuai dengan fungsi dari pemerintahan itu sendiri, sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selanjutnya Budiarjo (2003 ; 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Menurut perspektif Kybernologi, Ndraha (2005;192) Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Rasyid (1998;102) Fungsi pemerintah dibagi menjadi empat bagia, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan (development), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewaa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sinambela (2011;198) Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat inggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Osborne dan Plastrik (2004;322) mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak kerena itu harus dibagun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

2. Konsep Pembangunan

Menurut Tarigan (2005; 18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehiidupan manusia. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa :

a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:

   1) *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

   2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain.

   3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular, yaitu:

a. *Capacity,* hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.

b. *Equity,* hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.

c. *Empowerment,* hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.

d. *Suistanable,* hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Arief (2006; 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Suryono 2001; 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono,) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua,* pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Siagian (2009; 21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015; 249) Pembangunan adalah merupakan suatu prosess kegiatan yang terencana dalam upayah pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna penigkatan kualitas hidup manusia dan kesejahtraan masyarakat. Tahap Pelaksanaan Pembangunan desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengawasan

a. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningktan kesejahtraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
b. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
c. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Menurut Nurman (2015; 131) Pembangunan adalah manajemen pembangunan menuju suatu perubahan yang lebih baik yang diiginkan dalam upayah yang terencana dengan cara tidak merusak dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan baik yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengoordinasian, Pengontrolah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Perencanaan bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta waktu jangka pembangunan yang akan terlaksana.
b. Pengorganisasian langkah untuk menetapkan mengelolah pembangunan desa dengan sumber daya seta lingkungan desa dalam pembangunan desa dengan tepat.
c. Pengoordinasian proses pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam kemajuan pembangunan desa
d. Pengontrolah mengatur berbagai factor pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pencapaian tujuan pembangunan.

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Begitu juga menurut Juliantara (2003; 63) Berkenaan dengan pembangunan desa, Juliantara mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: "Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

3. Konsep Demokrasi

Menurut Ubaeidillah (2008;39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004;4) Dalam perkembangannya, Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga Negara).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin Negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004;56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan wargaNegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

4. Konsep Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. alam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yntu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh ssumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

5. Konsep Desa dan Otonomi Desa

1. Desa

Menurut Juliantara (2000;18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam.Oleh karean itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum , desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

"Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa".

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja(2003:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi mmasyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Menurut Jualiantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk menggatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi diatasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sutoro (2005;74) Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduannya.

Menurut Jones evaluasi (1999; 78) adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Dunn (2003:609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi berada sekala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti suatu nilai. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
   Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
   Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan mitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
   Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ssuatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan prosess harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus menejemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Wahad (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi imformasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Imformasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Dunn (2000;187) Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relavan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

d. Konsep Evaluasi

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau peroses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau peroses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada dsiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi,misi sasaran jangka panjang.

Draha juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after,* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen.*
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003; 185) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pemantauan fakto (f)
3. Pembandingan F dan S
4. Hasil pembandingan F=S,F<S,FS.
5. Analisis perbandingan berdasarkan model-model diatas.
6. Tindak lanjut
    a. Tindak Korektif
    b. Tindak afirmitif
    c. Feedback.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana evaluasi adalah merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya guna sejauhmana ketetntuan peraturan yang ditetapkan dan sejauhmana fakta yang telah terjadi.

7. Konsep Peranan

Menurut Soekamto (2004:212) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan (2009:212) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekamto (2009:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki suatu posisi tertentu, maka dia harus memahami apa-apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak semestinya dilakukan dalam menjalankan fungsinya dalam posisi tersebut sebagai bentuk dari tanggungjawabnya. Ketika orang tersebut mampu menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang seharusnya berarti orang tersebut telah menjalankan perannya.

Menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2007:264-274) : "Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya". Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 10 peranan yaitu :

a. Peranan Hubungan Antarpribadi (*Interpersonal Role)* yang terdiri dari:
    1. Peranan sebagai *Figurhead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
    2. Peranan sebagai pemimpin (*leader),* dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin.
    3. Peranan sebagai pejabat perantara (*liaison manager*), di sini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role)* yang terdiri dari :

1. Sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasikan seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.
2. Sebagai *Disseminator,* peranan ini melibatkan manajer menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
3. Sebagai juru bicara (*spokesman),* peranan ini dimainkan manajer untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.

c. Peranan Pembuat Keputusan (*decisional Role),* terdiri dari :

1. peranan sebagai *entrepreneur,* dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organsasinya.
2. peranan sebagai penghalau gangguan (*distrubande handler),* peranan ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika oraganisainya terancam bahaya, misalnya : akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.
3. peranan sebagai pembagi sumber *(resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini manajer diminta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.

4. peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada manajer untuk aktif berprestasi dalam arena negosiasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2004:149), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pencaharian alur (pathfindig) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (Aligning) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, system, dan proses operasional organsasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdaya (*empowering)* yaitu peran untuk menggerakan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreatifitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2011:51-52) Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari suatu posisi. Peran berkaitan dengan pengharapan perilaku untuk posisi-posisi tertentu. Teori peran menjelaskan bagaimana penngharapan sosial dapat mempengaruhi perilaku karyawan Perilaku-perilaku yang diharapakan ini biasanya sudah disepakati baik oleh individu pemegang posisi atau jabatan tersebut maupun oleh para anggota organisasi. Misalnya seorang direktur pemasaran suatu perusahaan diharapkan mengatur dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengawasi departemen pemasaran. Di samping peran yang diharapkan/expected role, ada juga peran yang di persepsikan dan peran yang di jalankan. Peran yang dipersepsikan/perceived role adalah seperangkat perilaku yang diyakini oleh seseorang harus dia lakukan karena posisinya, sedangkan peran dijalankan atau enacted role, yaitu perilaku yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut. Dalam suatu organisasi ada sejumlah individu yang memiliki peran ganda, misalnya selain menjabat direktur pemasaran seseorang juga menjadi anggota serikat pekerja. Peran ganda ini kadang-kadang cocok satu sama lain, tetapi tidak jarang bertentangan. Ketika peran ganda ini tidak cocok satu sama lain, maka individu tersebut dapat mengalami konflik peran/role conflict (Ivancevich, et al 2007).

8. Konsep Partisipasi

Menurut Windardi dalam Wiguna (2010;76) partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembutan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Partisipasi akan makslimal bila masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan, karena didalam partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapatwajib melaksakan dan dapat pula suka rela.

Partisipasi yang sifatnya diwajibkan kepada masyarakat berarti partisipasi yang memang harus dilakukan oleh masyarakat dan biasanya terdapat aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan partisipasi tersebut. Contohnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan diwajibkan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Partisipasi suka rela yaitu partisipasi yang tidak memiliki unsur pakasaan dan tidak terdapat peraturan yang mengikat dan dapat diikuti oleh masyarakat tampa harus memenuhi sarat apapun. Contohnya partisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong yang di jadwalkan oleh aparat desa setempat.

2. Partisipasi dapat formal dan informal

Partisipasi formal hampir sama dengan partisipasi wajib dimana setiap pelaksanaannya di atur dan ditentukan dengan seksama, serta biasanya memiliki sarat-sarat tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Sebaliknya, partisipasi non formal tidak memiliki aturan dan sarat-sarat yang baku yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, partisipasi non formal lebih bersifat fleksibel dan lebih cenderung bersifat suka rela.

3. Partsipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung dalam arti kata masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan jalan desa, masyarakat turun langsung ke lokasi untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut.Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak turut serta secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan, contohnya masyarakat hanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpartisipasi dalam memberikan atau menyediakan akomodasi dan konsumnsi bagi pekerja pembangunan jalan desa.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata parisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik.

Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2003:185) adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah sangat penting di dalam keseluruhan prosespembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu,menurut Taliziduhu Ndraha, 2000: 18, partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yaitu peroses ini adalah peroses dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan kegiatan pembangunan dan hal-hal lan yang akan menjadi acuan pada tahap partisipasi selanjutnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

   Proses ini adalah pelaksanaan keputusan-keputusan dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sehingga masyarakat langsung berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan tersebut

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

   Dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

4. Partisipasi dalam evaluasi

   Setelah pembangunan selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat selanjutnya masyarakat melakukan evaluasi untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang ada pada pembangunan tersebut.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secarasukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melaluiprogram pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memilikiterhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari programpemberdayaan.

9. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. (Gaventa dan Vlderma dalam Siti Irene: 2011:54) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna dimana dengan berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan akan ada banyak gagasan-gagasan serta ide-ide yang dapat tertuang agar pembangunan desa dapat terlaksana lebih baik lagi.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental. Dengan kata lain partisipasi masyarakat telah tersusun baik jadwal rapat, pelaksanaan pembangunan dan hal-hal lain sehingga pelaksanaan partisipasi masyarakat lebih teratur. Hal ini tentu mengacu pada lembaga-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lembaga kemasyarakatan atau pemerintah desa yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat

5. Berkaitan dengan diterimaya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Desentralisasi pemerintahan memungkinkan pemerintah desa dapat menggali potensi yang ada di desanya dan mengembangkannya sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri tampa harus mengandalkan dan bergantung pada pemerintahan pusat.
6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokrasi dan desentralisasi di Negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Siti Irene: (2011:54). Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang belangsung di tempat tinggalnya terebut. Meningkatkan kesadaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangun di desa.

2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang)

   Aspek tipologi ini berkaitan dengan keadaan alam dimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terhambat karena keadaan alam yang tidak memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)

   Aspek geografis ini juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana memerlukan waktu dan tenaga untuk dapat sampai pada lokasi atau tempat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

4. Demografis (Jumlah penduduk)

   Jumlah penduduk juga berpengaruh besar terhadap partisipasi dalam pembangunan. Dimana jumlah penduduk yang banyak lebih cenderung partisipasi dalam penmbangunan kurang dikarenangan pola fikir mereka yang menganggap masih banyak orang lain yang bisa ikut kegiatan pembangunan tersebut.

5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal)

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sudah menjadi alasan umum bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:51) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jeis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaa, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan katerlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantutas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas,keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output,* sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapakan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dnegan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai denganrencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

10. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor daridalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untukberpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat danlembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasisosial dalam masyarakat. Menurut Huraerah Abu (2008;85), mengemukakanpandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasiadanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Huraerah, (2008:97) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakatsendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah lakuindividu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur,jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Huraerah,2008:97). Secarateoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi,seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggotamasyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akansangat berpengaruh pada partisipasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian*.

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhiseluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakatmemahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2. *Pekerjaan masyarakat*.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpunwak tunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.*

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginandan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami danmelaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. *Jenis kelamin.*

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masihmenganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuanmasyarakat untuk berpartisipasi, beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akanmempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.*

Masyarakat dengan tingkat heterogenitasyang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategipartisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkalikepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

faktor-faktor eksternal inidapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan danmempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yangmempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting gunakesuksesan program.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Teori
1	**Ridwan**	Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.	Evaluasi Kebijakan : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan
2	Elyasip S Sembiring	Evaluasi kinerja Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Kinerja : 1. Potensi 2. Keahlian 3. Tanggap 4. Responsivitas
3	Faisal Yunan	Skripsi Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam pembangunan Desa Rawang Kao Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak	Evaluasi Kebijakan : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

Adapun perbedaan penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah bentuk pembangunan yang lebih spesifik terkait pembangunan di desa dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dan dijelasnkan dengan metode kualitatif serta perbedaan indicator teori yang digunakan, serta perbedaan yang lebih terperinci bahwa sipeneliti melihat ketetapan Pembangunan yang akan dilaksanakan dan melihat sejauh mana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Sumber : Medifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat adalah sejauh mana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam lajunya pembangunan di Kepenghuluan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pembangunan Kepenghuluan adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan tuntutan Kepenghuluan dalam pengembangan Kepenghuluan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluan.
3. Perencanaan dalam penelitian ini adalah perencanaan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta waktu jangka pembangunan yang akan terlaksana.
4. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kepenghuluan dengan masyarakat Kepenghuluan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
5. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.
6. Efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
7. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
8. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan
9. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
11. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*ranting*) dan penilaian (*assement*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilaai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir	Efektivitas	1. Perencanaan Pembangunan. 2. Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Anggaran Pembangunan. 2. Pencapaian Pembangunan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa. 2. Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Kegiatan pembangunan 2. Pemerataan Pembangunan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. 2. Penetapan pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4	5
		Ketepatan	1. Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Desa. 2. Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Desa.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Peranan Kepala Kepenghuluan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Responivitas dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, bahwa pelaksanaan tuga penghulu dalam penyelenggaraan pembangunan terlaksana dengan baik masih banyak rancangan bangunan yang telah ditetapkan belum terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2003; 08).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kepenghuluan, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Urusan, Kadus, Ketua RW, Ketua RT, BPD dan Masyarakat/ KK.

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kepenghuluan	1	1	100%
2	Sekretaris Kepenghuluan	1	1	100%
3	Kepala Urusan	1	1	100%
4	Kadus	2	2	100%
5	Ketua RW	2	2	100%
6	Ketua RT	3	3	100%
7	BPD	5	5	100%
8	Mayarakat/KK	168	20	12%
Jumlah		183	35	19%

Sumber : Data Olaha Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Kepala Kepenghuluan, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Urusan, Kadus, Ketua RW, Ketua RT dan BPD digunakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 15 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat/KK dengan menggunakan teknik Purposif Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak, hal ini jumlah sampel sebanyak 20 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moelong (2011;112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapar dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kepenghuluan, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Kusioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Kuisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu masayarakat Kepenghuluan.

2. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

3. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian yaitu Kepenghuluan.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Tekhnik Analisis Data

Pengelolaan data ini dalam penelitian kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar pastisipasi masyarakat Kepenghuluan dalam pembangunan Kepenghuluan dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Quisioner																								
5	Rekomendasi Survay																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengganda an Skripsi																								

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 9 Kelurahan dengan luas wilayah 531,22 KM2 atau 53,122 Ha. Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam terbentuk berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam, yang dulunya berinduk pada Kecamatan Kubu. Kecamatan Kubu Babussalam terdiri dari beberapa Kepenghuluan antara lain; Kepenghuluan Sungai Panji-panji, Kepenghuluan Pulau Halang Muka, Kepenghuluan Pulau Halang Belakang, Kepenghuluan Pulau Halang Hilir, Kepenghuluan Sungai Majo, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kepenghuluan Jojol, Kepenghuluan Teluk Nilap.

Berikut dapat diketaui jumlah penduduk yang ada di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
RT 01	**83**	**96**	**179**
RT 02	**155**	**122**	**277**
RT 03	**198**	**197**	**395**
RT 04	**101**	**116**	**217**
RT 05	**102**	**82**	**184**
RT 06	**123**	**117**	**240**
RT 07	**38**	**29**	**67**
Total	**800**	**759**	**1.559**

Sumber : Kantor Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 800 perempuan sebnyak 759 dengan jumlah penduduk keseluruhan 1.559

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Agama yang dianut

Kode	Agama
	Islam
RT 01	165
RT 02	269
RT 03	287
RT 04	257
RT 05	273
RT 06	233
RT 07	165
Total	1.559

Sumber : Kantor Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, 2020

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Agama yang dianut dengan agama islam sebanyak 1.559 jumlah penduduk sebnyak 1.559.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kode	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	Diploma	
RT 01	48	50	31	41	2	3	4	179
RT 02	85	60	44	71	2	2	13	277
RT 03	120	91	77	91	2	2	12	395
RT 04	79	48	25	49	2	8	6	217
RT 05	53	48	36	36	1	2	8	184
RT 06	60	58	41	68	7	1	5	240
RT 07	28	14	7	13	-	1	4	67
Total	473	369	261	369	16	19	52	1.559

Sumber : Kantor Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, 2020

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tidak sekolah 473, Tamat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52 dengan jumlah penduduk 1.559.

B. Tugas kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala
Desa wajib:

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkann dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat dilihat dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	26	77%
2	Perempuan	9	23%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 26 orang, dimana jumlah 26 adalah jumlah produktif, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	4	12%
2	25-39 tahun	10	29%
3	40-49 tahun	21	59%
4	≥ 50 tahun	-	-
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 21 orang atau sekitar 59%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun lbih aktif didalam melakukan pekerjaan, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 10 orang atau sekitar 29% dan selebihnya yaitu berusia 25 keatas berjumlah 4 orang atau sekitar 12% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	22	62%
4	Diploma	10	29%
5	Sarjana	3	9%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 21 orang atau sekitar 62% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 10 responden atau sekitar 29%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 3 responden atau sekitar 9%, selanjutnya responden dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Penghuluan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa dimana pada Pasal 44 kepala desa dalam melaksanakan sejumlah tugas-tugas sebagai berikut :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kepala Desa berwenang :
   a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
   c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
   d. menetapkan Peraturan Desa;
   e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   f. membina kehidupan masyarakat Desa;
   g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
   h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
   i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
   j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
   k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
   l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
   m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
   n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan diatas tugas Kepala Desa atau penghulu diatas salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan pembangunan secarapartisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan terhadap kepenghuluan Rantau Panjang adalah melakukan musrembang.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Kepenghuluan sagatlah dibutuhkan keikut sertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Kepenghuluan tersebut meliputi Pembangunan Bahu Jalan Pembangunan Box Curver Seminisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepala Kepenghuluan belum dapat melaksanakan pembangunan Kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepenghuluan terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara luas yang diberikan penghuluan terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babus Salam Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dengan pengertian efektivitas seperti itu maka dalam Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan.
2. Penetapan Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perencanaan Pembangunan.	6 (18%)	23 (68%)	5 (15%)	34
2	Penetapan Pembangunan. .	7 (21%)	24 (71%)	3 (9%)	34
Jumlah		**13**	**47**	**8**	**68**
Rata-rata		**7**	**23**	**4**	**34**
Persentase		**21%**	**68%**	**12%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Perencanaan Pembangunan dimana responden penelitian tentang Kegiatan pembangunan bahu jalan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau 18% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan pemerintah Kepenghuluan Bersama dengan BPD dan Unsur Masyarakat Kepenghuluan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 68% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan belum secara menyeluruh melibatkan Unsur mayarakat melainkan hanya BPD didalam penyaluran aspirasi masyarakat Kepenghuluan. sSelanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan belum adanya ketetapan pembahasan secara Bersama pemerintah Kepenghuluan Bersama BPD dan Lembaga kemasyarakat Kepenghuluan melainkan hanya Pemerintah Kepenghuluan Bersama dengan BPD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian untuk item penilaian Penetapan Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 21% dengan alasan, Penetapan Pembangunan oleh penghulu Bersama dengan BPD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 68% dengan alasan, Penetapan Pembangunan Kepenghuluan sudah terlaksana akan tetapi belum seutuhnya kegiatan pembangunan Kepenghuluan berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 9% dengan alasan, Diketahui Penetapan Pembangunan belum sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melainkan penetapan oleh Penghulu semata.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau

Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 68% dengan alasan, pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan dengan melakukan Musyawarah Pembangunan kepenghuluan bersama dengan pemerintah Kepenghuluan, BPD dan Unsur Masyarakat meliputi Toko Agama, Toko Politik, Toko Adat serta Lembaga Kemasayarakat Desa dalam menetapkan akan perencanaan pembangunan, akan tetapi kenyataannya didalam perencanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan Kepenghuluan unsur masyarakat dan Lembaga Pemerintahan Kepenghuluan belum dilibatkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan secara menyeluruh melainkan hanya BPD didalam penetapan aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan Kepenghuluan belum tepat sasaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...Sejauh ini pelaksanaan pemabangunan Kepenghuluan mulai dari perencaan sampai dengan penetapan saya sudah melakukan musyawarah didalam rapat perencanaan dengan memberikan himbauan terhadap BPD dan Unsur masyarakat, akan tetapi didalam musyawarah kebanyakan unsur masyarakat tidak ikut hadir secara menyeluruh melainkan hanya perwakilan saja Bersama dengan BBP, yam au tak mau kita harus mengadakan rapat agar pembangunan dapat ditetapkan dan dilangsungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kepenghuluan…."

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa perencanaan pembangunan Kepenghuluan dimana unsur masyarakat belum ikut serta secara menyeluruh dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan hal ini dikarenakan unsur masyarakar belum di undang dalam musyawarah pembangunan sehingga aspirasi masyarakat belum di diterapkan dalam perencanaan pembangunan kepenghuluan sehingga perencanaan pembangunan Kepenghuluan cenderung atas ketetapan penghulu.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pembangunan Kepenghuluan mulai dari perencanaan dan penetapan pembangunan Kepenghuluan dengan melakukan musyawarah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah Kepenghuluan dengan BPD dan Unsur Masyarakat serta menetapkan akan hasil perencanaan untuk dilaksanakan akan tetapi kenyataannya didalam perencanaan pembangunan Kepenghuluan unsur masyarakat belum dilibatkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan secara menyeluruh melainkan hanya BPD didalam penetapan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Perencanaan Pembangunan, Penetapan Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Anggaran Pembangunan.
2. Pencapaian Pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Anggaran Pembangunan.	9 (26%)	20 (59%)	5 (15%)	34
2	Pencapaian Pembangunan.	10 (29%)	21 (62%)	3 (9%)	34
Jumlah		**19**	**41**	**8**	**68**
Rata-rata		**9**	**21**	**4**	**34**
Persentase		**26%**	**61%**	**15%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Anggaran Pembangunan dimana responden penelitian tentang Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 26% dengan alasan, Anggaran Pembangunan sudah ditetap sesuai dengan pembangaunan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 59% dengan alasan, Anggaran Pembangunan sudah ditetapkan berdasarkan penetapan pembangunan yang dilakukan yaitu pemabagunan Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box Curve, Semenisasi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden atau 15% dengan alasan, Anggaran Pembangunan diketahui tidak sesuai dengan penetapan pelaksanaan pembangunan dikarenakan biaya yang ditetapkan terlalu besar dengan penetapan pelaksana dialapangan.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaian Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 29% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan sudah ditetapkan dengan tujuan kegiatan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan terget pelaksana yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 62% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan belum memberikan hasil yang maksimal dimana diketahui kegiatan pembangunan belum selesai dengan dengan penetapan target pencapaiannya sekitar 3 sampai 4 bulan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 9% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan belum sesuai dengan waktu kegiatan penyelesaian sehingga terlihat tidak sesuai dengan penetapan target penyelesaiannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Box Curver Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 61% dengan alasan, pelaksanaan pembangunan dengan mulai dengan penetapan Anggaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan bahwa ditetapkannya pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan hasil kegiatan pembangunan belum sesuai waktu penyelesaian pembangunan sehingga sebagaian pembangunan ada yang belum selesai sehingga menunggu kegiatan pembangunan tahun depan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...sejauh ini kegiatan akan pembangunan mulai dari anggaran dan kegiatan pelaksanaan sampai dengan selesai sudah melalui musyawarah Kepenghuluan dan sudah berdasarkan pertimbangan bersama dengan tujuan kegiatan pembangunan terlaksana, meskipun pada kegiatan pembangunan belum terlaksana sesuai dengan waktu kegiatan pembangunan yang ditetapkan dikarenakan benturan-benturan dilapangan seperti hari hujan cuaca yang tidak menentu sehinga kegaiatan pembangunan terkendala.."

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai dengan ketetapannya dengan realiasasi dilapangan.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa pembangunan mulai dari penetapan Anggaran pembangunan Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box Curve, Semenisasi bahwa anggaran yang ditetapkan belum sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dan hasil kegiatan pembangunan belum sesuai waktu penyelesaian pembangunan sehingga sebagaian pembangunan ada yang belum selesai sehingga menunggu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan pembangunan tahun depan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Anggaran Pembangunan, Pencapaian Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan. Dengan pengertian Kecukupan seperti itu maka dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan.
2. Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat	10 (29%)	19 (56%)	5 (15%)	34
2	Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan.	10 (29%)	20 (62%)	4 (9%)	34
Jumlah		**20**	**39**	**9**	**68**
Rata-rata		**10**	**19**	**5**	**34**
Persentase		**29%**	**55%**	**15%**	**100%**

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan dimana responden penelitian tentang Kegiatan pembangunan bahu jalan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 29% dengan alasan, Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan sudah dilaksanakan lura Usulan semenisasi masyarakat sudah dilakukan penghulu melalui pengundangan pemberian himbauan akan musyawarah pembangunan Kepenghuluan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 56% dengan alasan, Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan sudah terlaksanakan akan tetapi belum semuan unsur masyarakat mengikuti Musrembang hal ini dikarenakan penghulu belum melakukan pengundangan bagi Unsur masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara menyeluru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, diketahui Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan belum terlaksana denganmaksimal dimana penghulu belum melakukan pengundangan dari unsur masyarakat didalam Musrembang pembangunan Kepenghuluan sehingga penetapan musrembang terhadap pembangunan Kepenghuluan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.

Kemudian untuk item penilaian Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 29% dengan alasan, Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan sudah dilakukan oleh penguhu dengan melakukan pengundangan terhadap Lembaga Kemasyarakat Kepenghuluan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 62% dengan alasan, Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan sudah terlaksana akan tetapi belum semua Lembaga Kemasyarakatan hadir untuk mengikuti musrembang dikarenaka belum dilakukannya pengundangan secara menyeluruh bagi Lembaga Kemasyarakat Kepenghuluan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 9% dengan alasan, bahwa Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan belum dihadiri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Lembaga kemasyarakatan Kepenghuluan sevara menyeluruh dikarenakan belum dilakukannya pengundangan oleh Penghulu secara menyeluruh.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Box Curver Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup telaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 68% dengan alasan, bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan bahwa penghulu belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh sehingga kegiatan pperencanaan pembangunan Kepenghuluan tidak tetap sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...Sejauh ini didalam perencanaan pembangunan Kepenghuluan saya selaku penghulu sudah melakukan pengundangan terhadap unsur masayrakat Kepenghuluan dan Lembaga kemasayarakat Kepenghuluan didalam perencanaan masyarakat Kepenghuluan, meskipun sejauh ini belum dapat hasir secara menyeluruh hal ini dikarenakan saya memberikan undangan melalui himbauan saja yang sepantasnya mereka dapat hadir sebagai wakil masyarakat Kepenghuluan akan tetapi kenyataannya belum secara menyeluruh hadir didalam mengikuti musrembang Kepenghuluan..."

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa Anggaran pembangunan bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa penghulu belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan bahwa penghulu belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh sehingga kegiatan perencanaan pembangunan Kepenghuluan tidak tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan, dan Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan.
2. Pemerataan Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kegiatan Pembangunan.	**7 (21%)**	**23 (68%)**	**4 (15%)**	34
2	Pemerataan Pembangunan.	**9 (26%)**	**20 (59%)**	**5 (15%)**	34
Jumlah		**16**	**43**	**9**	**68**
Rata-rata		**8**	**22**	**4**	**34**
Persentase		**24%**	**64%**	**12%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Kepenghuluan dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau 21% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan meliputi Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Curve, dan Semenisasi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 68% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan sudah ditetapkan akan tetapi penetapan pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kepenghuluan sehingga penetapan pembangunan belum tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.

Kemudian untuk item penilaian Pemerataan Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 26% dengan alasan, Pemerataan Pembangunan dengan melakukan pembangunan kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 59% dengan alasan, Pemerataan Pembangunan belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat Kepenghuluan melainkan identik dengan dekat akses penghulu sehingga masih banyak dipedalam Kepenghuluan yang belum dilakukannya semenisasi jalan sehingga mempengaruhi akses masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, bahwa Pemerataan Pembangunan kepenghuluan belum adanya pemerataan sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan hal ini terlihat pedalaman Kepenghuluan belum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukannya kegiatan pembangunan sehingga mempengaruhi kegiatan akses masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 22 atau 64% dengan alasan, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh penghulu belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kepenghuluan serata kegiatan pembangunan Kepenghuluan belum dilaksanakan sampai di pedalam Kepenghuluan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan Kepenghuluan cenderung yang berdekatan dengan akses Penghulu sehingga terlihat belum adanya pemerataan pembangunan agar akses kegiatan masyarakat Kepenghuluan beralngsung dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...Sejauh ini upaya pemerataan kegiatan pembangunan Kepenghuluan sudah mulai dilakukan sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan dalam pembangunan, namun saya sebagai penghulu selalu berupanya menetapkan apa yang menjadi terpenting di kepenghuluan sehingga di uoayakan duluan untuk dilaksanakan...."

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh penghulu belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kepenghuluan serata kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan Kepenghuluan belum dilaksanakan sampai di pedalam Kepenghuluan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh penghulu belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kepenghuluan serata kegiatan pembangunan Kepenghuluan belum dilaksanakan sampai di pedalam Kepenghuluan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan Kepenghuluan cenderung yang berdekatan dengan akses Penghulu sehingga terlihat belum adanya pemerataan pembangunan agar akses kegiatan masyarakat Kepenghuluan beralngsung dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kegiatan Pembangunan, Pemerataan Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Responsivitas Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.
2. Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	**10 (29%)**	**20 (59%)**	**4 (12%)**	34
2	Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan.	**11 (32%)**	**18 (53%)**	**5 (15%)**	34
Jumlah		**21**	**38**	**9**	**68**
Rata-rata		**10**	**19**	**5**	**34**
Persentase		**29%**	**56%**	**15%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas dalam item penilaian Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 29% dengan alasan, Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan sudah terlaksana. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 59% dengan alasan, Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan sudah terlaksana akan tetapi belum secara menyeluruh pembangunan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat sesuai dengan aspirasi masyarajat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 12% dengan alasan, diketahui bahwa Penetapan Pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kepenghuluan.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 32% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan sudah dilakukan oelh Penghulu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 53% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlaksanakan akan tetapi belum semua yang menjadi aspirasi masyarakat dipehuhi melainkan pembangunan identic terhadap pengembangan akses Penghulu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan belum sesuai dengan aspirasi masyarakat melainkan penetapan oleh penghulu semata sehingga penetapan pembangunan belum tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 19 atau 56% dengan alasan, Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan belum didadasarkan oleh aspirasi masyarakat Kepenghuluan sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan melainkan kegiatan pembangunan identic dengan ketetapan Penghulu semata serta pembangunan di lingkungan Penghulu sehingga penetapan pelaksanaan pembangunan belum terlaksana tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...Sejauh ini pembangunan yang ditetapkan didalam pembangunan Kepenghuluan sudah berdasarkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan, emang tidak semua tapi kita tetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kepenghuluan artinya pembangunan kita tetapkan secara bertahan di dekat warga dulu bar uke pedalaman Kepenghuluan...."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan belum didadasarkan oleh aspirasi masyarakat Kepenghuluan sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan belum didadasarkan oleh aspirasi masyarakat Kepenghuluan sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan melainkan kegiatan pembangunan identic dengan ketetapan Penghulu semata serta pembangunan di lingkungan Penghulu sehingga penetapan pelaksanaan pembangunan belum terlaksana tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepenghuluan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Kepenghuluan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Ketepatan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kemampuan Penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan.
2. Kemampuan Penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan.	**8 (23%)**	**20 (58%)**	**6 (50%)**	34
2	Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan.	**10 (29%)**	**17 (50%)**	**7 (20%)**	34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4	5
Jumlah	**18**	**37**	**13**	**68**
Rata-rata	**9**	**19**	**6**	**34**
Persentase	**26%**	**56%**	**18%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam item penilaian Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau 23% dengan alasan, Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan sudah terlaksana.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 58% dengan alasan, Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan sudah terlaksana akan tetapi penghulu belum mengetahui secara luas apa yang menjadi pembangunan didalam meningkatkan akses kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 50% dengan alasan, diketahui bahwa Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan belum dapat memberikan kemajuan didalam pembangunan Kepenghuluan hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan Kepenghuluan hanya ditetapkan dan dilaksanakan terhadap pemukiman ramai dan dekat dengan lingkungan Penghulu melainkan tidak adanya pemerataan pembangunanan sampai kepadalaman Kepenghuluan.

Kemudian untuk item penilaian Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 29% dengan alasan, Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan sudah terlaksana. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 17 responden atau 50% dengan alasan, Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan sudah terlaksana akan tetapi pembagunan yang ditetapkan dan dilaksanakan belum terlaksana dengan maksimal dimana kegiatan pembangunan masih adanya yang belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 20% dengan alasan, Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan belum memberikan keberhasilan dimana masih ada pembangunan yang belum terselesaikan didalam pelaksanaanya melainkan harus dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 19 atau 56% dengan alasan, Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan bahwa penghulu belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan kepenghuluan dan kepentingan masyarakat Kepenghuluana sehingga penetapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan Penghulu belum memberikan kemajuan terhadap pembangunan Kepenghuluan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adil Makmur Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 8 Juli 2020 menjelaskan bahwa :

> "...Sejauh ini saya sudah menetapkan dan melaksanakan pembangunan di Kepenghuluan dengan kemampuan saya sesuai dengan apa yang menjadi bagian pengembangan pembangunan Kepenghuluan, emang saya belum secara menyelurh atas kemampuan saya menetapkan kegiatan pemabngunan pembangunan kepenghuluan melainkan Bersama dengan apa yang menajdi keinginan masyarakat Kepenghuluan...."

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau bahwa Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan diksetahui penghulu belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan kepenghuluan sesuai dengan yang di aspirasikan masyarakat kepenghuluan.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pembangunan Kepenghuluan bahwa penghulu belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan kepenghuluan dan kepentingan masyarakat Kepenghuluana sehingga penetapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan Penghulu belum memberikan kemajuan terhadap pembangunan Kepenghuluan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kemampuan penghulu dalam menerapkan pembangunan Kepenghuluan, dan Kemampuan penghulu dalam keberhasilan pembangunan Kepenghuluan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori Cukup Terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	**Efektivitas**	**7 (21%)**	**23 (68%)**	**5 (15%)**	**34**
2	**Efisiensi**	**9 (26%)**	**21 (61%)**	**4 (12%)**	**34**
3	**Kecukupan**	**10** (29%)	**19** (55%)	**5** (15%)	**34**
4	**Perataan**	**8** (24%)	**22** (64%)	**4** (12%)	**34**
5	**Responsivitas**	**10** (29%)	**19** (56%)	**5** (15%)	**34**
6	**Ketepatan**	**9** (26%)	**19** (56%)	**6** (18%)	**34**
Jumlah		**53**	**123**	**29**	**228**
Rata-rata		**9**	**21**	**4**	**34**
Persentase		**26%**	**62%**	**12%**	**100%**

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 21%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 23 atau 68%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 atau 15%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 61%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 12%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana 10 responden atau 29%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana 8 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau 64%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 12%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana 10 responden atau 29%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15%.

Untuk indikator keenam Ketepatan dalam Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 19 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 18%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 26%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 21 orang atau persentase 62%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 4 orang atau 12%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir cukup terlaksana, dimana Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan oemerintah Kepenghuluan terkait pembangauan yang akan dialksanakan serta sesuai dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan yang diberikan terkait pembangunan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat mulai dari pembangunan bahu jalan Kepenghuluan, Box Curver serta semenisasi. Pelaksanaan kegaiatan pembangunan secara luas belum dilakukan tepat sasaran sesuai dengan ABPDes yang telang ditetapkan sesuai dengan anggaran tahunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimana diketahui pada pembangunan bahu jalan belum tepat sasaran yaitu pada jalan yang rusak dan dialkukan pelebaran yang berdampak pada kebutuhan warga masyarakat agar bahu jalan dapat digunakan pengendara dan pejalan kaki akan tetapi pemabgunan bahu jalan dilakukan pada jalan yang masih jarang dilalui masyarakat sehingga tidak memprioritaskan pada usulan masyarakat, dan pembangunan Pembangunan Box Curver dinilai ditempatkan tidak pada jalan umum Kepenghuluan melainkan pada jalan yang jarang dilaui masyarakat hal ini terlihat di daerah lingkunangan Penghulu yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum sehingga dinilai penghulu belum memiliki kemampuan didalam menganalisasi akan upaya-upaya penetapan pembangunan yang akan dilakukan, serta pelaksanaan semenisasi diketahui masih dilakukan dilingkungan pemukiman penghulu sementara masyarakat pedalam masih mengalami keterhambatan didalam beraktivitas dikarenakan jalan yang rusak dan telah diusulkan dan dibincangkan akan tetapi penghulu mengutamakan lokasih lain yang berdekatan dengan lingkungannya sehingga diketahui pelaksanaan tuga Penghulu didalam pembangunan kepenghuluan belum terlaksana dengan baik.

C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Diketahui Penghulu belum secara maksimal melakukan pengundangan terhadap Unsur Kemasyarakat Kepenghuluan dan Lembanga Masyarakat Kepenghuluan secara menyeluruh didalam Prencanaan Pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengundangan sehingga arah penetapan pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan apayang menjadi aspirasi masyarakat.

Diketahui bahwa penetapan Pembangunan Kepenghuluan oleh penghulu belum mengarah terhadap kebutuhan masyarakat Kepenghuluan terutama di pedalaman Kepenghuluan melainkan cenderung didekat kediaman Penghulu sehingga terlihat kurang meratanya pembangunan yang terlaksana.

Belum adanya pengawasan yang ketat oleh penghulu terkait kegitan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga pembangunan ada yang belum terselesaikan sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditetapkan sehingga kegiatan pembangunan dilanjutkan di tahun berikutnya. Adapun pembangunan yang belum terealisasi sesuai dengan penetapan waktu penyelesaian meliputi

1. Pembangunan Bahu Jalan

Pembangunan bahu jalan belum terlaksana dengan maksimal hal ini diketahui pelaksanaan ketetapan pembagunan bahu jalan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dimana diketahui pembangunan bahu jalan di Jalan Sidodadi dengan volum 150 m x 2.10 = 315 melainkan tercapai hanya 100 m dan Pembangunan Bahu Jalan Jalan Anas 130 m x 2.00 = 260 melainkan yang terlaksana hanya 100 m Sehingga pada keyatanya tidak sesuai dengan ketetapan pelaksanaan sesuai dengan yang dianggarakan.

2. Pembangunan Box Curver

Pembangunan Box Curver Kep. Rantau Panjang Kiri belum belum terealisasi sesuai dengan waktu penyelesaiannya dimana pembangunan Box Curver harus diselesaikan ke Tahun berikutnya dan Box Curver yang dianggarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan ukuran 40x40x100 yang seharusnya 50x50x100 sesiau dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan dilapangan, sehingga terlihat belum tepat sasaran dan pengerjaan Box Curver dinilai masih lamban sementra jalan tersebut akan digunakan masyarakat didalam beraktivitas.

3. Semenisasi

Pelaksanaan semenisasi belum terlaksana sesuai dengan yang dianggarkan meliputi Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung Masjid, Volum 104 M x 2.10 M x 0.15M = 32.76, pada kenyataannya yang terlaksana hanya 100M, Semenisasi Jalan Datuk Penghulu, Volum 173 M x 4 M x 0.15 M = 103.8, pada kenyatannya terlaksana hanya 150m, dan Semenisasi Jalan Sakya, volume 100 M x 4 M x 0.15 M = 400, Pada keyataannya terlaksana 90 Meter.

Diketahui bahwa belum mampunya penghulu didalam perencanaan dan penetapan pembangunan mulai sesuai dengan kebutuhan Desa sehingga perencanaan dan penetapan pembangunan Desa belum mengarah terhadap kebutuhandan aspirasi masyarakat Kepenghuluan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam katagori cukup terlaksana dimana diketahui pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana namun belum maksimal dimana diketahui penyelenggaraan pembangunan mualai dari perencanaan bahwa penghulu belum melakukan pengundangan terhadap unsur masyarakat Kepenghuluan dan Lemabga Kemasyarakatan Kepenghuluan sehingga penetapan pemabagunan tidak tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat, dan Penghulu belum mampu didalam mengenali akan kebutuhan pembangunan didesa melainkan pembangunan cenderung didekat lokasi kediaman Penghulu sehingga terlihat belum adanya pemerataan pemabngunan pembangunan.
2. Hambatan-hambatan di Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir meliputi :
    a. Diketahui Penghulu belum melakukan kerjasama dengan Unsur Kemasyarakatan Kepenghulun dan Lemabagan Kemasyarakat Kepenghuluan didalam pembangunan Kepenghuluan melalui pengundangan secara menyeluruh didalam Prencanaan Pembangunan Pengundangan sehingga arah penetapan pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belum tepat sasaran sesuai dengan apayang menjadi aspirasi masyarakat.

b. Diketahui bahwa penghulu belum melakukan surve terkait akan pembangunan yang akan ditetapkan sehingga penetapan dan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan.

c. Penghulu belum menerima apa aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga Penetapan Pembangunan Kepenghuluan oleh penghulu belum mengarah terhadap kebutuhan masyarakat Desa terutama di pedalaman Kepenghuluan melainkan cenderung didekat kediaman Penghulu sehingga terlihat kurang meratanya pembangunan yang terlaksana.

d. Belum pengawasan penghulu terhadap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga pembagunan jalan tidak terealisasi sesuai dengan kegiatan anggaran yang ditetapkan.

B. Saran

1. Hendaknya penghulu lebih meningkatkan pengetahuannya didalam penempatkan pembangunan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
2. Hendaknya penghulu melakukan perbandingan dan penetapan akan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan kepenghuluan.
3. Perlunya Penghulu melakukan pengawasan disetiap pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Hendaknya penghulu bekerjasama dengan masyarakat terkait upaya-upaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan yang akan dilaksanakan.

5. Hendaknya penghulu menerima usulan menerapkan terkait pembangunan didalam meningkatkan aktivitas masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

A.Ubaeidillah dan Abdul Rozak, 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.

Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Imu Politik.* Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.

David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desntralisasi dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan.*Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Eko, Sutoro dkk. 2005. Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung. Yogyakarta, IRE Press.

Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.

Huraerah Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Kerakyatan.* Bandung. Humaniora.

Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar.

Juliantara, *Wijaya,* 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi* Daerah, Yogyakarta, Pembaharuan.

Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Bandung, Mandar Maju.

L.P. Sinambela. 2011. *Pelayanan Publik Edisi I*. Jakarta, Bumi Aksara

Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung.Mandar.

Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuah.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta, Raneka Jaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

_____ 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta. Ndraha,

Taliziduhu. 2000. Pembangunan Masyarakat. Jakarta. Rineka Cipta. Rahyunir

Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Nusa Media. Yogyakarta.

Rasyid, M. Ryass. 2000. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.

Rivai, Veithzal, 2004, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Edisi Kedua), Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Situmorang, Victor M. 2000. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.

Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.

Sondang, P Siagian. 2009. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Bumi aksara.

Soekamto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. *Perilaku Organisasi (cetakan Pertama).* Jakarta: PT Buku Seru

Syafhendri. 2008. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syaiful, Arief. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijaka,* Averroes Cipta, Malang.

Tarigan, Robinson. 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilaya*. Jakarta : Pustaka LP3S.

Thoha, Miftah, 2007, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya,* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Kampung*. Bandung, Fokusmedia.

Waab S.A, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua,* Jakarta, Bumu Aksara.

Wiguna 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.

B. Perundang-undang

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa.

Peraturan Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kepenghuluan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :